



Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas



**RANCANGAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2024**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

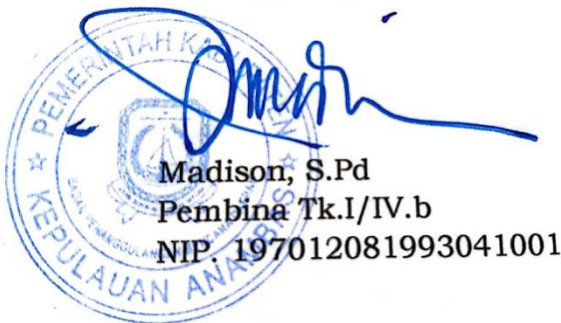
Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2024 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas .  
Wassalamu'alaikum wr,wb.

Tarempa, 15 Juli 2024

Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah,



Madison, S.Pd  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 197012081993041001

	Hal.
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
 <b>Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN LALU .....</b>	 <b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD .....	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD .....	14
2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD .....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
 <b>Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	 <b>21</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Perubahan Renja BPBD Tahun 2020 .....	21
3.3 Program dan Kegiatan .....	22
 <b>Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	 <b>25</b>
 <b>Bab V PENUTUP .....</b>	 <b>28</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga terkait, Rencana kerja dari Pemerintah Provinsi dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan Kerja Perubahan PD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Sebagai dokumen rencana Tahunan, Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah penjabaran Rencana Kerja lima Tahunan berupa Renstra PD sehingga Rancangan Perubahan Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Perubahan Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Rancangan Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. Rancangan Perubahan Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan, merupakan rencana pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

***“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan dan Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Kharimah”***

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata

dalam bentuk misi, sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar, prosedur, pemetaan kewilayahan, resiko terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kebencanaan;
2. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan diskusi forum pencegahan dan penanggulangan kebencanaan;
3. Memantapkan koordinasi dengan instansi vertikal antara lain TNI, Polri, Kejaksaan Negeri dalam hal pencegahan dini terhadap potensi bencana dan memperkuat jaringan informasi di kecamatan;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
5. Menjalin koordinasi dan meningkatkan kerjasama untuk mencapai kinerja yang baik;
6. Penyediaan kajian dan penyusunan pedoman terkait pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kebencanaan;
7. Peningkatan intensitas koordinasi tim kewaspadaan dini dengan meningkatkan jaringan informasi, serta;
8. Peningkatan penyampaian informasi tentang pengetahuan kebencanaan dan meningkatkan peran serta masyarakat seluas-luasnya;
9. Penyediaan pendidikan dan pelatihan.

Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD yang telah ditetapkan melalui prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian pembangunan secara berkala yang dalam penyusunannya memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**Rancangan Perubahan Renia BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi,

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**  
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 640/16/SJ Tahun 2021 penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2024, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sebagai hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 77);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 487).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pembuatan Rencana Kerja (Rancangan Perubahan Renja) dimaksudkan dalam rangka menentukan arah dan pedoman dalam melaksanakan rencana kegiatan Tahunan dalam jangka 1 (satu) Tahun yang akan dimuat dalam Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RANCANGAN PERUBAHAN RENJA) Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai acuan Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) Tahun perencanaan. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra SKPD dan Rancangan Perubahan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**1.4. SISTEMATIKA**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD), analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rancangan Perubahan Renja OPD, serta program dan kegiatan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**



#### **Rancangan Perubahan Renia BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju Tahun depan.

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN LALU**

**II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD**

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan diperkirakan capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024. Fungsi Evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Selain itu juga dilakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan proyeksi realisasi Anggaran Tahun 2024.

Pada Tahun Anggaran 2023, APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar Rp. 11.618.317.239 dengan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan keseluruhan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.140.941.911 Berikut ini Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Tabel 2.1) serta Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel 2.2) sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024**

No	Program	No	Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas**

2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	8	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		9	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		10	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas**

**Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Program Penunjang	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

	Kabupaten/Kota	Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten /Kota								
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

		Pemerintah Daerah								
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	Jumlah Bulan terpenuhinya Program Penanggulang an Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90



**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	100	100	100	12 Bulan	100	100	12 Bulan	90

## **II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas dan kewajiban rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana Secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1. Keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang masih baru terbentuk namun tetap berupaya untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang belum ada secara menetap
3. Ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang belum memadai
4. Belum adanya pelatihan penanganan dan Penanggulangan dalam menghadapi bencana secara *massif* dan menggandeng lintas sektor serta masyarakat
5. Belum terbentuknya peningkatan peran lintas sektor dan penggalangan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
6. Belum Maksimalnya Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
7. Belum maksimalnya gudang penyimpanan logistik penanggulangan bencana
8. Perlu adanya peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk kegiatan lapangan
9. Perlu adanya kegiatan simulasi kebencanaan yang melibatkan lintas sektor (Basarnas, TNI, Polri, serta relawan bencana), agar tercipta *trust* antar tim penanggulangan bencana
10. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanggulangan bencana
11. Perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan peran masyarakat

dalam penanganan bencana

12. Belum adanya Kajian Kebutuhan Pasca Bencana untuk mengidentifikasi dampak dari kejadian bencana

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan Tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas  
Tahun 2024**

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas**

NO	Indikator	SPM / stand ar nasio nal	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahu n 2021	Tah un 202 2	Tahu n 2023	Tahu n 202 4	Tahu n 2021	Tahu n 2022	Tah un 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	11	12		16	17	
1	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	-	-	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	80%	90%	-
2	Cakupan penanggulangan bencana	-	-	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100%	-

### **II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Adanya akses jalan/konektivitas yang rusak atau belum selesai dan perlunya peningkatan konektivitas antar wilayah;
2. Belum optimalnya penyediaan jaringan telekomunikasi/informasi di beberapa wilayah kecamatan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM, pelayanan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani, dan pembinaan desa, serta peningkatan pelayanan proses perizinan dalam rangka penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

#### **A. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah**

1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;
3. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan

masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur

**B. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;

1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
2. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

**C. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah**

1. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
3. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

**II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 lebih ditekankan kepada peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana.

Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 hanya menitikberatkan pada analisa kebutuhan Tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan tidak memiliki perbedaan baik dari tolak ukur dan pagu indikatif dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2024. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :



**Tabel 2.4. Alokasi Plafon Anggaran Sementara Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

Rancangan RKPD					Kebutuhan Analisis Kebutuhan				
Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Targ et Capaian Kinerja	Kebutuha n Dana/ Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuh an Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah bulan terpenuhiny a Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	89.402.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	178.804.000

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	5.820.785.104	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	11.279.867.088
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	469.160.050	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	830.315.500
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKA	12 Bulan	471.390.307	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKA	12 Bulan	750.674.100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	4.734.168.400	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKA	12 Bulan	9.750.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	KKA	12 Bulan	57.093.290	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	KKA	12 Bulan	200.640.000

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun**

Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah			
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Program Penanggulangan Bencana</b>				<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah bulan Pelayanan Penanggulangan Bencana</b>			
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	KKA	12 Bulan	20.000.000	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	KKA	12 Bulan	200.000.000
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	12 Bulan	98.106.675	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KKA	12 Bulan	400.000.000
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	KKA	12 Bulan	219.850.300	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	12 Bulan	470.000.000

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun**

Korban Bencana	Bencana				Evakuasi Korban Bencana				
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KKA	12 Bulan	105.722.000	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KKA	12 Bulan	300.414.600

## **II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas Tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Rancangan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Rancangan Perubahan Renja adalah rutinitas perencanaan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

##### **III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

###### **I. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional**

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam pembangunan nasional Indonesia lima Tahun kedepan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan kedepannya juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwagotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan ilmu pengetahuan teknologi sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.



b. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan dokumen RPJMD pembangunan daerah diarahkan pada “Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan melayu Kepri”. Prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan menengah atas, penguatan promotif dan preventif kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Dengan fokus pada pengembangan koperasi dan UMKM, pembangunan dan pengembangan industri pengolahan (skala menengah dan besar), pengembangan perdagangan, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan wilayah provinsi, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari.

3. Pengembangan pusat kebudayaan melayu

Dengan fokus pada penyediaan prasarana dan sarana penunjang pusat kebudayaan melayu, dan peningkatan pelestarian adat dan seni budaya daerah.

4. Pengembangan infrastruktur wilayah

Dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, peningkatan kualitas jalan provinsi, peningkatan akses sanitasi (air limbah, persampahan, drainase) peningkatan sarana prasarana air bersih, peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan, peningkatan pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan, dan perluasan ruang terbuka hijau

5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

### **III.2 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat tercapai. Sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan *leading sector* penanggulangan bencana dan membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan bencana. Untuk itu, disusun kebijakan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, kebijakan strategis yang disusun harus dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Visi yang harus didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah :

*“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Kharimah”.*

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, sasaran dalam menunjang visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana (Kajian Resiko Bencana dan Penanganan Resiko

Bencana);

- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterimadari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mengacu pada Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Terbangunnya kesadaran pengurangan resiko bencana yang terintegrotasi dalam seluruhaspek pembangunan
		Terleksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencan
		Tumbuhnyarasa sadar akan penanganan dalam menghadapi bencana
		Terwujudnya sistem pelaporan kinerja keuangan yang akuntabel

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, maka program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih menitikberatkan pada hal Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya Serta Berahlakul Karimah. Dimana faktor tersebut dapat dicapai melalui Program/Kegiatan yang telah dirumuskan oleh Badan Penanggulangan Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten guna Mendukung tercapainya Prioritas Pembangunan yaitu **“Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong”**.

Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang

direncanakan, paling banyak terdapat di ibu kota Kabupaten yaitu Tarempa hal ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bencana. Sebagai OPD yang memastikan terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, hampir semua program/ kegiatan yang sasarannya adalah seluruh daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk lebih jelasnya, Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4. 1.

Mengenai prioritas dan sasaran pembangunan nasional, hal tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan dapat tercapai. Program dan Kegiatan yang dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 terdiri dari:

<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

## **2. Program Penanggulangan Bencana**

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota
- b) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c) Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d) Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Masih terdapat beberapa kendala dalam penganggaran di subkegiatan, terutama pada Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dari beberapa tahun yang lalu mengalami kekurangan anggaran sehingga berdampak pada tidak maksimalnya penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

BAB IV  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS

Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan dasar							
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bulan terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			KKA	12 Bulan	69.704.552	DAU		12 Bulan	69.704.552
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya Jasa Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	12 Bulan	69.704.552	DAU		69.704.552	69.704.552
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			KKA	12 Bulan	5.498.011.052	DAU		12 Bulan	5.498.011.052
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	KKA	12 Bulan	5.262.343.052	DAU		5.262.343.052	5.262.343.052
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	KKA	12 Bulan	235.668.000	DAU		235.668.000	235.668.000



**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun**

<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>473.381.985</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>473.381.985</b>
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor yang disediakan	KKA	12 Bulan	8.500.000	DAU		8.500.000	8.500.0000
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan alat tulis kantor yangdiadakan	KKA	12 Bulan	96.322.208	DAU		96.322.208	96.322.208
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	KKA	12 Bulan	17.880.870	DAU		17.880.870	17.880.870
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	KKA	12 Bulan	37.336.227	DAU		37.336.227	37.336.227
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yangtersedia	KKA	12 Bulan	34.836.680	DAU		34.836.680	34.836.680
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yangdihadiri	KKA	12 Bulan	278.506.000	DAU		278.506.000	278.506.000
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>421.114.213</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>421.114.213</b>
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	KKA	12 Bulan	244.484.854	DAU		244.484.854	244.484.854
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	KKA	12 Bulan	103.535.734	DAU		103.535.734	103.535.734
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>4.611.592.594</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>4.611.592.594</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik	KKA	12 Bulan	58.552.000	DAU		58.552.000	58.552.000

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun**

13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase PPKD, pengelola BMD dan pegawai tidak tetap yang dibayarkan honorariumnya	KKA	12 Bulan	4.553.040.594	DAU		4.553.040.594	4.553.040.594
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>63.093.290</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>63.093.290</b>
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara dan memiliki izin	KKA	12 Bulan	8.138.330	DAU		8.138.330	8.138.330
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	KKA	12 Bulan	54.954.960	DAU		54.954.960	54.954.960
<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Program Penanggulangan Bencana</b>							
<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>110.975.451</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>110.975.451</b>
16	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	KKA	12 Bulan	110.975.451	DAU		110.975.451	110.975.451
<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>43.102.920</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>43.102.920</b>
17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	KKA	12 Bulan	43.102.920	DAU		43.102.920	43.102.920

**Rancangan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun**

<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>174.726.654</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>174.726.654</b>
18	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	KKA	12 Bulan	58.959.000	DAU		58.959.000	58.959.000
19	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KKA	12 Bulan	115.767.654	DAU		115.767.654	115.767.654
<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>Jumlah Bulan terpenuhinya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>KKA</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>251.867.500</b>	<b>DAU</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>251.867.500</b>
20	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	KKA	12 Bulan	251.867.500	DAU		251.867.500	251.867.500
		<b>Jumlah</b>			<b>11.644.476.586</b>				<b>11.644.476.586</b>

Jumlah Program : 2  
 Jumlah Kegiatan : 10  
 Jumlah Sub Kegiatan : 20

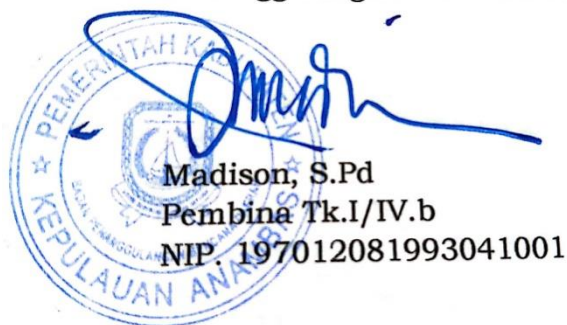
## **BAB V PENUTUP**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Rencana Kerja (Rancangan Perubahan Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu Tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja (Rancangan Perubahan Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tarempa, 15 Juli 2024

Kepala Pelaksana Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah,



Madison, S.Pd  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 197012081993041001